

# E-Readiness Dalam Penerapan Sistem Kerja Cepat (SIKECE) Dalam Pelayanan Publik Di Kantor Lurah Kerinci Timur Kabupaten Pelalawan

Yuriska Addriani<sup>1</sup> Eko Handrian<sup>2</sup>

Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Riau, Jl. Kharudin Nasution  
No. 133 Perhentian Marpoyan, Pekanbaru, Indonesia  
[yuriskaaddriani@student.uir.ac.id](mailto:yuriskaaddriani@student.uir.ac.id) [ekohandrian@soc.uir.ac.id](mailto:ekohandrian@soc.uir.ac.id)

Received : 09 Juni 2025

## Abstract

*This study was conducted to determine the readiness of the implementation of the fast work system (SIKECE) for the community and the Kerinci Timur Village Office in implementing the online service website provided by the Kerinci Timur Village Office. This type of research uses a mixed method in which primary data is obtained through observation, interview results with the Kerinci Timur Village Head and 1 community user of the SIKECE website, documentation, and distribution of questionnaires to the community users of the SIKECE website totaling 91 people and the SIKECE website implementation and management team totaling 17 people, with a total sample of 110 people and the sampling technique using purposive sampling techniques, and secondary data is obtained through documents related to the object of research. In this study, the researcher uses the readiness theory which contains three dimensions of indicator research, namely support, ability and value. The results of this study indicate that the readiness of the SIKECE website is categorized as "Less Ready", in the readiness of the SIKECE website there are still several obstacles, namely the lack of utilization of special employees who manage SIKECE.*

**Keywords:** E-readiness, Website, SIKECE, East Kerinci Village Office

## Abstrak

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kesiapan penerapan sistem kerja cepat (SIKECE) terhadap masyarakat dan Kantor lurah Kerinci Timur dalam penerapan website pelayanan secara online yang di sediakan Kantor Lurah Kerinci Timur. Tipe penelitian ini menggunakan mixed method yang mana data primer diperoleh melalui observasi, hasil wawancara dengan Lurah Kerinci Timur dan 1 orang masyarakat pengguna website SIKECE, dokumentasi, dan penyebaran kuesioner terhadap masyarakat pengguna website SIKECE yang berjumlah 91 orang dan tim pelaksana dan pengelola website SIKECE Yang berjumlah 17 orang, dengan total sampel sebanyak 110 orang dan teknik penarikan sampel menggunakan teknik pruposive sampling, Dan data sekunder diperoleh melalui dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori kesiapan yang terdapat tiga dimensi penelitian indikator yaitu dukungan, kemampuan dan nilai. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kesiapan website SIKECE di kategorikan "Kurang Siap", di dalam kesiapan website SIKECE ini masih ada terdapat beberapa kendala yaitu belum di manfaatkannya pegawai khusus yang mengelola SIKECE, serta masih terdapat masyarakat yang kurang siap dalam penggunaan SIKECE.

**Kata Kunci :** E-readiness, Website,SIKECE, Kantor Lurah Kerinci Timur

## Pendahuluan

Kemajuan teknologi informasi membuka peluang besar bagi pemerintah untuk melakukan transformasi digital. Dengan adanya kemajuan teknologi maka Pemerintah

Indonesia saat ini sedang mengimplementasikan sistem *e-government*, sesuai dengan Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-government, dan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), di mana sistem *e-government* ini menggunakan kemajuan teknologi dan komunikasi, yang pada dasarnya penerapan *e-government* ini adalah untuk meningkatkan kualitas proses pelayanan dari lembaga pemerintah kepada masyarakat melalui pelayanan secara online. Implementasi *e-government* juga memudahkan pemerintah dalam mensinkronkan data dari pusat hingga daerah serta melalui sistem ini masyarakat dapat berpartisipasi langsung dan juga mengontrol pekerjaan pemerintah.

*E-readiness* merupakan landasan penting bagi transformasi digital sektor publik dan mewujudkan tata kelola yang baik. Dengan meningkatkan kesiapan elektronik, sektor publik dapat memberikan layanan berkualitas lebih tinggi, meningkatkan efisiensi dan efektivitas, serta mendorong transparansi dan akuntabilitas sehingga dengan memanfaatkan teknologi dapat memudahkan pemerintah memberikan pelayanan publik dan masyarakat memperoleh pelayanan. Hal ini pada akhirnya akan berkontribusi pada peningkatan daya saing nasional dan terciptanya masyarakat sejahtera.

*E-readiness* atau kesiapan elektronik menjadi hal yang penting di era digital, khususnya bagi sektor publik. Hal ini karena *e-readiness* memungkinkan pemerintah untuk:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik: Memberikan pelayanan yang mudah diakses, cepat, akurat, transparan dan efisien, serta menjangkau masyarakat marginal.
2. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi: Meningkatkan kepercayaan masyarakat dengan membuka informasi publik dan akuntabilitas pemerintah.
3. Mendorong inovasi dan kolaborasi: Membuka peluang bagi layanan publik yang baru dan inovatif, dan meningkatkan kolaborasi untuk memecahkan tantangan bersama.
4. Optimalisasi sumber daya: Meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya publik dan meningkatkan produktivitas aparatur sipil negara.
5. Menciptakan pemerintahan yang inklusif: Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan membangun masyarakat digital.

Di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah terdapat bab yang secara khusus mengatur inovasi daerah. Disebutkan bahwa dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, pemerintah daerah dapat melakukan inovasi. Inovasi adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Inisiatif inovasi dapat berasal dari Kepala Daerah, anggota DPRD, Aparatur Sipil Negara, Perangkat Daerah, dan anggota masyarakat. Dan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Inovasi Daerah pada Pasal 1 yang menjelaskan, bahwa Inisiatif Inovasi Daerah berasal dari Perangkat Daerah. Sejalan dengan peraturan tersebut Kepala Lurah Kerinci Timur telah membuat inovasi dalam pelayanan publik berbasis website yaitu Sistem Kerja Cepat (SIKECE) dengan 17 jenis pelayanan, dengan tujuan agar pelayanan lebih mudah, murah, dan cepat. Hal ini dapat meningkatkan pelayanan publik berjalan dengan efektif dan efisien.

Kantor Lurah Kerinci Timur mengembangkan SIKECE sebagai layanan berbasis website. Kantor Lurah bekerja sama dengan PT RAPP dalam pengembangan SIKECE.

Kerjasama ini sejalan dengan Pasal 195 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, yang mengizinkan pemerintah daerah bekerja sama dengan pihak ketiga dalam penyediaan layanan publik. Tentu keterlibatan pihak swasta tersebut diperlukan karena membutuhkan teknisi IT yang ahli dalam pembuatan website.

Kelurahan merupakan institusi yang berdiri di garda terdepan sebagai koordinator untuk berbagai jenis urusan pemerintahan termasuk memberikan rutinitas pelayanan kepada masyarakat. Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur merupakan kelurahan yang terpadat penduduknya di Kabupaten Pelalawan dengan total penduduk beridentitas Kerinci Timur sebanyak 41.458 jiwa dan secara akumulatif termaksud domisili berjumlah kurang lebih 67 ribu jiwa dan jumlah kepala keluarga 11.349, dengan luas Kelurahan 70.3 Km<sup>2</sup>.

Pelayanan di Kantor Lurah Kerinci Timur secara manual terkesan berbelit-belit dan lama dikarenakan masyarakat harus melengkapi standar operasional prosedur ke Kantor Lurah untuk mengambil dan mengisi blangko pengantar ke RT dan RW. Setelah itu ke Kantor Lurah kembali sehingga terkesan lama dan timbulnya keresahan masyarakat yang memiliki jarak tempuh yang jauh dari Kantor Lurah Kerinci Timur. Oleh karena itu memang diperlukannya inovasi pelayanan berbasis online untuk memudahkan masyarakat memperoleh pelayanan Terdapat 17 (Tujuh Belas) jenis pelayanan yang dibutuhkan masyarakat Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur dapat diakses dengan mudah melalui <http://kerincitimur.online> antara lain: surat keterangan kematian, surat keterangan usaha, surat keterangan tidak mampu, izin keramaian, data janda tua, surat keterangan domisili, surat keterangan sebelum nikah, pengantar nikah, data lansia, data yatim piatu, surat keterangan sebelum bekerja, surat keterangan belum memiliki rumah, izin umkm, surat keterangan domisili usah, surat keterangan penghasilan, data rumah ibadah, surat keterangan tanggungan.

### **Tinjauan Pustaka**

Secara umum *e-readiness* adalah kemampuan suatu individu ataupun kelompok untuk siap dalam memanfaatkan teknologi. Adapun kesiapan elektronik disebut sebagai suatu ukuran terhadap kesiapan secara nasional, ekonomi, dan persiapan untuk menerima manfaat dari penggunaan ICT.

Kajian dan riset *Harvard JFK School of Government* dalam Richardus eko indrajit (2006), mengatakan bahwa untuk menerapkan konsep-konsep digitalisasi pada sektor publik diperlukan 3 (tiga) elemen sukses yang harus ada yaitu:

1. *Support*: merupakan elemen paling krusial yang harus dimiliki pemerintah. keinginan dari berbagai kalangan pejabat publik dan politik untuk benar-benar menerapkan konsep pelayanan melalui pemanfaatan TIK, bukan hanya sekedar mengikuti tren global atau menentang inisiatif yang berkaitan dengan prinsip-prinsip *e-government*. tanpa adanya *political will* ini mustahil pembangunan dan pengembangan layanan digital ini dapat berjalan dengan mulus. adapun bentuk dukungannya berupa disepakatinya kerangka *e-government* dan pemberian prioritas pembangunan dan pengembangan *e-governement* sebagai salah satu kunci sukses negara untuk mencapai visi misinya; dialokasikannya sumber daya (SDM, keuangan, tenaga, waktu, informasi, dll.) di setiap tataran pemerintahan untuk membangun konsep ini dengan semangat lintas sektoral; dibangunnya infrastruktur dan suprastruktur pendukung agar tercipta lingkungan yang

kondusif dalam pengembangan *e-government* seperti regulasi, kelembagaan dll; disosialisasikannya konsep *e-government* secara merata, kontinyu, konsisten, kepada seluruh birokrat secara khusus dan masyarakat pada umumnya.

2. *Capacity*: merujuk pada adanya unsur kemampuan atau keberdayaan dari pemerintah setempat dalam mewujudkan impian *e-government* terkait menjadi kenyataan yang terdiri atas minimum 3 (tiga) elemen yaitu: ketersediaan sumber daya yang cukup untuk melaksanakan berbagai inisiatif *e-government* terutama yang berkaitan dengan sumber daya finansial; ketersediaan infrastruktur teknologi informasi yang memadai karena fasilitas ini merupakan 50% dari kunci keberhasilan penerapan konsep *e-government*; ketersediaan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan keahlian yang dibutuhkan agar penerapan *e-government* dapat sesuai dengan asas manfaat yang diharapkan. Ketiga syarat itu harus terpenuhi untuk mencapai keberhasilan implementasi *e-government*.
3. *Value*: elemen kedua dan ketiga merupakan dua aspek yang dilihat dari sisi pemerintah selaku pihak pemberi jasa (*supply side*). berbagai inisiatif *e-government* tidak akan ada gunanya jika tidak ada pihak yang merasa diuntungkan dengan adanya konsep tersebut, dan dalam hal ini yang menentukan besar tidaknya manfaat dengan adanya *e-government* bukanlah pemerintah itu sendiri melainkan masyarakat yang berkepentingan (*demand side*). pemerintah harus benar-benar teliti dalam mengembangkan aplikasi atau menyediakan layanan *e-government* yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat sehingga dapat memberikan (*value*) manfaat. kesalahan dalam memenuhi layanan *e-government* yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat akan menjadi bumerang bagi pemerintah itu sendiri yang akan mempersulit dalam usaha *pengembangan e-government*. perpaduan ketiga elemen tersebut diatas akan membentuk sebuah pusat syaraf jaringan *e-government* yang merupakan kunci sukses keberhasilan penerapan *e-government*. tanpa memperhatikan ketiga elemen tersebut dalam penerapan konsep *e-government*, maka probabilitas kegagalan implementasi *e-government* tinggi.

Dan Menurut Musa (2010) dalam risetnya tentang alat penilaian *e-readiness* untuk regional pemerintah daerah di Iraq menawarkan sebuah metode pengukuran *e-readiness*. Metode ini mengukur aspek tertentu dari masyarakat dan beberapa fitur layanan dan teknologi yang diperlukan dalam transformasi penyelenggaraan pemerintahan dari sistem konvensional ke arah digital atau disebut dengan *e-government*. hasil pengukuran tersebut dapat membantu pengambil keputusan dalam menentukan apa saja yang patut menjadi prioritas dan perbaikan yang harus dilakukan kedepannya dalam meningkatkan *e-readiness* suatu organisasi. Adapun indikator yang diusulkan Musa (2010) sebagai instrument pengukuran *e-readiness* di tingkat pemerintah daerah yaitu sebagai berikut:

**Tabel 1.**

**Indikator E-readiness**

No.	Infrastructure	Human Resource (Users and Governmentemployees)	Government & Management
1.	<i>Speed of Internet</i>	<i>Government Trust</i>	<i>Computerization</i>
2.	<i>Availability</i>	<i>Skills</i>	<i>Willingness(Political Will)</i>

3.	<i>Cost of Internet</i>	<i>Education</i>	<i>Fund</i>
4.	<i>Reliability</i>	<i>Usage</i>	<i>Policies</i>
5.	<i>Mobile Internet</i>	<i>Training</i>	<i>Legal Framework</i>

Sumber: Musa (2010:80)

## Metode

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode mixed methods. Penelitian ini merupakan suatu langkah penelitian dengan menggabungkan dua bentuk penelitian yang telah ada sebelumnya yaitu penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif.

Tipe yang digunakan yaitu metode campuran konkuren (*Concurrent Mixed Methods*) Menurut Creswell (2009:31) metode campuran konkuren adalah prosedur di mana peneliti menyatukan atau menggabungkan data kuantitatif dan kualitatif untuk memberikan analisis komprehensif terhadap masalah penelitian. Dalam desain ini peneliti mengumpulkan kedua bentuk data pada saat yang sama dan kemudian mengintegrasikan informasi tersebut dalam interpretasi hasil keseluruhan. Selain itu dalam desain ini peneliti dapat memasukkan satu bentuk data yang lebih kecil ke dalam kumpulan data lain yang lebih besar untuk menganalisis berbagai jenis pertanyaan (kualitatif membahas proses sedangkan kuantitatif adalah hasilnya).

Strategi yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada konsep (Creswell, 2010: 320-324) Strategi triangulasi konkuren. Dalam strategi ini, peneliti mengumpulkan data kuantitatif dan data kualitatif dalam waktu bersamaan pada tahap penelitian, kemudian membandingkan antara data kualitatif dengan data kuantitatif untuk mengetahui perbedaan atau kombinasi.

## Hasil dan Pembahasan

Dari pembahasan masing-masing indikator keseluruhan tanggapan responden masyarakat pengguna website SIKECE dan tim pelaksana dan pengelola website SIKECE maka dilakukan rekapitulasi responden sebagai berikut:

Tabel 2.

Rekapitulasi Responden Masyarakat Pengguna Dari Masing-Masing Indikator E-Readiness Dalam Penerapan Sistem Kerja Cepat (SIKECE) Dalam Pelayanan Publik Di Kantor Lurah Kerinci Timur Kabupaten Pelalawan

No	Indikator	Kategori Penilaian			Jumlah
		S	KS	TS	
1.	<i>Support</i> (dukungan)	70 (77%)	20 (22%)	1 (1%)	91 (100%)
2.	<i>Capacity</i> (kemampuan atau keberdayaan)	82 (90%)	8 (9%)	1 (1%)	91 (100%)

1.	2	3	4	5	6
3.	<i>Value</i> (manfaat atau nilai)	82 (90%)	8 (9%)	1 (1%)	91 (100%)
	Jumlah	234	36	3	273
	Rata-rata	78	12	1	91
	Presentase	86%	13%	1%	100%

Sumber: Data olahan hasil peneliti, 2024

Berdasarkan tabel V.15 diatas yang menjelaskan hasil Rekapitulasi jawaban responden Masyarakat Pengguna website SIKECE dengan rata-rata tanggapan responden berjumlah 86% sesuai dengan penjelasan sebelumnya tentang presentase 67- 100% masuk kedalam kategori “Siap”

Berdasarkan hasil penelitian dan observasi lapangan, dapat disimpulkan bahwa sebagian masyarakat kurang siap memanfaatkan pelayanan publik melalui platform SIKECE. Terdapat beberapa kendala yang perlu diperhatikan, yaitu sebagian masyarakat belum siap memiliki kompetensi dan pengetahuan mengenai teknologi dikarenakan rendahnya literasi digital masyarakat. Meskipun telah dilakukan sosialisasi, upaya tersebut belum optimal menjangkau seluruh lapisan masyarakat. serta tidak semua masyarakat siap dalam sumber daya finansial memenuhi infrastruktur yang memadai, hal ini karena masi adanya masyarakat miskin di sekitar Kerinci Timur, serta masih ada wilayah yang memiliki infrastruktur konektivitas jaringan yang tidak bagus. Sehingga belum siapnya sebagian masyarakat merasakan manfaat dari penggunaan SIKECE.

Adapun kesiapan dalam penggunaan Website SIKECE di Kantor Lurah Kerinci Timur secara keseluruhan dapat dilihat dari beberapa indikator penilaian. Mulai dari segi *support* (dukungan), dengan dukungan melalui kesepakatan kerangka *e-government* masyarakat dilibatkan sebagai tim pelaksana dan pengelola website SIKECE yaitu setiap RT dan RW wilayah Rawa Badak, Lalang dan Pulau Payung. Masyarakat siap meluangkan waktu dan tenaga melauai informasi yang tertera pada platform SIKECE untuk datang ke kantor lurah melakukan tanda tangan surat yang sudah didownload melalui SIKECE.

Masyarakat memiliki infrastruktur yang memadai untuk mendukung penggunaan SIKECE, namun sebagian masyarakat belum siap memiliki infrastruktur seperti handphone yang mendukung pengaksesan SIKECE dan memiliki kuota jaringan internet. Hal ini karena masih ada masyarakat yang miskin tersebar didaerah Rawa Badak, Lalang dan Pulau Payung. Dari segi suprastruktur pedoman cara kerja penggunaan SIKECE didalam website tersebut sudah ada namun belum dijelaskan secara rinci, bagi masyarakat yang belum terbiasa menggunakan website pelayanan merasa belum siap mengerti cara kerja SIKECE dan masih diperlukan pendampingan, hal tersebut juga dipengaruhi oleh sosialisasi penggunaan SIKECE belum terlaksanakan secara optimal.

Dari aspek *Capacity* (kemampuan atau keberdayaan) menilai dari sisi sumber daya finansial masyarakat siap untuk membeli handphone dan membeli kuota jaringan internet secara mandiri, serta masyarakat mampu membayar uang printnan surat yang telah terdownload melalui SIKECE. Bagi masyarakat dengan penghasilan menengah keatas tidak

merasakan keberatan dalam sumber daya finansial untuk menggunakan SIKECE. Namun sebaliknya beberapa masyarakat tidak siap secara finansial untuk ketersediaan infrastruktur yang mendukung penggunaan SIKECE. Untuk penyediaan website SIKECE memiliki tampilan desain yang sudah bagus dan memiliki banyak jenis pelayanan yang bisa dipilih oleh masyarakat sesuai kebutuhan. Untuk keamanan data masyarakat sejauh ini belum ada laporan khusus mengenai pencurian data. Untuk kompetensi dan keahlian masyarakat memiliki pengetahuan tentang penggunaan teknologi sehingga dapat dengan mudah siap beralih pada sistem pelayanan online. Namun, terdapat kelompok masyarakat, khususnya lansia, yang masih menghadapi kendala dalam penggunaan teknologi dan kurang siap beralih ke dalam pelayanan secara online melalui SIKECE.

Dari segi *Value* (manfaat/nilai) Sistem Informasi Kerja Cepat (SIKECE) dari sisi masyarakat dapat merasakan manfaat dari kemudahan dalam mengakses layanan publik. Proses pengurusan surat menyurat menjadi lebih efektif dan efisien, karena masyarakat dapat mengisi formulir secara daring dan mengunduh dokumen yang diperlukan kapan saja dan di mana saja, dan masyarakat hanya tinggal datang membawa surat yang sudah jadi untuk meminta tanda pada Kantor Lurah. Namun masyarakat yang tidak siap menggunakan SIKECE karena faktor ketidak tahuan akan adanya SIKECE dan karena kurangnya pemahaman terhadap teknologi tidak merasakan manfaat dari SIKECE tersebut

Tabel 3.

Rekapitulasi Responden Tim Pelaksana Dan Pengelola Dari Masing-Masing Indikator E-Readiness Dalam Penerapan Sistem Kerja Cepat (SIKECE) Dalam Pelayanan Publik Di Kantor Lurah Kerinci Timur Kabupaten Pelalawan

No	Indikator	Kategori Penilaian			Jumlah
		S	KS	TS	
1.	<i>Support</i> (dukungan)	17 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	17 (100%)
2.	<i>Capacity</i> (kemampuan/keberdayaan)	15 (88%)	2 (12%)	0 (0%)	17 (100%)
3.	<i>Value</i> (manfaat/nilai)	17 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	17 (100%)
	Jumlah	49	2	0	51
	Rata-rata	16	1	0	17
	Presentase	94%	6%	(0%)	100%

Sumber: Data olahan hasil peneliti, 2024

Bedasarkan tabel V.16 diatas yang menjelaskan hasil Rekapitulasi jawaban responden Tim Pelaksana Dan Pengelola website SIKECE dengan rata-rata tanggapan responden berjumlah 94% sesuai dengan penjelasan sebelumnya tentang presentase 67- 100% masuk kedalam kategori "Siap"

Berdasarkan hasil penelitian dan observasi lapangan, dapat disimpulkan bahwa Kantor Lurah Kerinci Timur Kabupaten Pelalawan kurang siap dalam memberikan pelayanan publik melalui platform SIKECE. Berdasarkan rekapitulasi dari hasil masing-masing indikator pihak tim pelaksana dan pengelola SIKECE masih terdapat kendala. Adapun beberapa kendala yang perlu diperhatikan, yaitu keterbatasan infrastruktur teknologi, belum dimanfaatkannya staf pegawai yang memiliki kompetensi dan keahlian mengelola SIKECE, belum terlaksanakannya sosialisasi dengan optimal.

Website SIKECE di Kantor Lurah Kerinci Timur secara keseluruhan sudah siap dalam beberapa indikator penilaian. Mulai dari segi support (dukungan), dengan dukungan yang kuat melalui kesepakatan kerangka *e-government* dalam pembagian tugas dan jabatan sudah tertera dalam keputusan Camat Pangkalan Kerinci melalui pembentukan tim pelaksana dan pengelola SIKECE. Namun saat ini SIKECE dikelola oleh lurah sebagai admin dan belum diserahkan kepada pegawai kantor lurah yang sudah tertulis didalam keputusan tersebut. Sehingga Untuk pengalokasian sumber daya yang mengelola SIKECE saat ini adalah lurah. Dengan adanya SIKECE dapat mengefisiensi waktu dan tenaga yang dibutuhkan pegawai dalam pemberian pelayanan, namun tanda tangan masih dilakukan secara manual sehingga apabila lurah ataupun sekretaris lurah berada diluar kantor maka akan digantikan oleh kasi. Untuk ketersediaan infrastruktur yang mendukung pelaksanaan SIKECE saat ini sudah tersedia komputer, printer dan jaringan Wi-Fi, namun perlu dilakukannya pemeliharaan untuk mendukung kecepatan kinerja pegawai. SIKECE sudah memiliki standar operasional prosedur tertuang dalam keputusan Camat Pangkalan Kerinci didalam pembentukan tim pelaksana dan pengelola SIKECE dan pedoman cara kerja yang tertera didalam website SIKECE. Dan untuk sosialisasi sudah dilaksanakan secara online maupun offline namun belum terlaksana secara optimal.

Dari aspek *Capacity* (kemampuan atau keberdayaan) untuk ketersediaan sumber daya finansial yang mendukung pelaksanaan SIKECE saat ini sudah siap berasal dari APBD pelalawan yang diletakkan Di Kantor Camat Pangkalan Kerinci dan dialokasikan kepada Kantor Lurah Kerinci Timur dalam bentuk belanja rutin fasilitas pendukung seperti komputer dan printer, serta berasal dari Corporate Social Responsibility (CSR) PT RAPP dalam mendukung IT pembuatan website SIKECE membuat desain dan 17 pelayanan sesuai permintaan Kantor Lurah Kerinci Timur. Namun kantor lurah belum siap mengelola server sendiri hal ini karena keterbatasan finansial dan kemampuan dari staf pegawai dalam mengelola SIKECE, kantor lurah sudah berusaha meminta bantuan kepada Dinas komunikasi informatika dan statistik (diskominfo) pelalawan namun belum ada respon hingga saat ini. Di tingkat Kantor Lurah, seluruh staf telah memiliki kompetensi dasar dalam memanfaatkan teknologi informasi. Meskipun demikian, belum terdapat petugas khusus yang ditugaskan untuk mengelola SIKECE secara penuh, sehingga tugas ini masih didelegasikan kepada Lurah.

Dari segi *Value* (manfaat atau nilai) Sistem Informasi Kerja Cepat (SIKECE) memberikan manfaat bagi pegawai kantor lurah, SIKECE menyederhanakan alur kerja, meningkatkan efisiensi, dan mempercepat penyelesaian tugas pegawai. Namun pegawai Lurah Kerinci Timur kurang siap memanfaatkan SIKECE sebagai pemberian pelayanan utama yang dipilih masyarakat. Sehingga masyarakat masih melakukan pelayanan secara manual yang membuat kantor lurah kurang maksimal menerima manfaat dari kehadiran SIKECE.

## Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Sistem Kerja Cepat (SIKECE) yang diterapkan di Kantor Lurah Kerinci Timur Kabupaten Pelalawan, dapat disimpulkan bahwa “Kurang Siap” dan terdapat beberapa kendala yang masih ditemukan dalam *e-readiness* website SIKECE baik dari segi masyarakat maupun Kantor Lurah Kerinci Timur. Pertama, keterbatasan literasi digital masyarakat menyebabkan sebagian besar belum siap menggunakan SIKECE. Kedua, ketidak stabilan jaringan internet serta masih ditemukannya masyarakat miskin yang tidak memiliki infrastruktur memadai di beberapa wilayah menjadi hambatan dalam mengakses SIKECE. Ketiga, belum adanya pegawai khusus untuk mengelola SIKECE dan masih dikelola oleh Lurah Kerinci Timur. Keempat, pengelolaan server yang diserahkan kepada pihak ketiga, yaitu PT RAPP, perlu menjadi perhatian untuk keamanan data masyarakat kedepannya. Kelima sosialisasi mengenai SIKECE juga masih belum optimal. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain kepadatan penduduk dan luas wilayah. Akibatnya, masih banyak masyarakat yang belum mengetahui dan manfaat SIKECE.

Untuk mengetahui kesimpulan setiap indikator mengenai *e-readiness* penerapan sistem kerja cepat (SIKECE) dalam pelayanan publik di kantor lurah Kerinci Timur Kabupaten Pelalawan, maka hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Indikator *support* (dukungan) berada dalam kategori kurang siap, kesepakatan kerangka *e-government* dalam penerapan website SIKECE dari sisi masyarakat melibatkan ketua RT dan RW serta menggandeng sektor pemerintah dan sektor swasta, yaitu Dinas Komunikasi Dan Informatika, Camat Pangkalan Kerinci, Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah, Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil, Dinas sosial, Kepala Bidang Infrastruktur TIK, pihak swasta Tim ahli IT RAPP Dan menggandeng pihak Media. Waktu penyelesaian pelayanan melalui SIKECE sesuai standar operasional prosedur yaitu 10 menit apabila sudah terverifikasih dan siap untuk didownload, namun tunda tangan dilakukan secara manual yang mengharuskan masyarakat mempersiapkan waktu dan tenaga untuk datang ke Kantor Lurah Kerinci Timur. Infrastruktur kantor lurah saat ini sudah tersedia komputer dan printer serta jaringan internet Wi-Fi, namun masih perlu dilakukannya pemeliharaan hal ini karena terdapat komputer dan kualitas jaringan yang sudah lemot. sebagian masyarakat sudah memiliki infrastruktur yang memadai untuk mengakses SIKECE, namun sebagian masyarakat belum siap memiliki infrastruktur yang memadai. Dalam suprastruktur SIKECE terdapat standar operasional prosedur (SOP) serta cara kerja yang tertulis didalam platform website SIKECE. Sebagian masyarakat kurang siap mengerti pedoman cara kerja SIKECE dan memerlukan pendampingan. Kantor Lurah Kerinci Timur sudah melakukan sosialisasi namun memang belum terlaksanakan secara maksimal hal ini karena faktor banyaknya jumlah penduduk sebanyak 41.458 jiwa dengan luas wilayah Kerinci Timur 70.3 Km<sup>2</sup>.
2. Indikator *Capacity* (kemampuan dan keberdayaan) dari segi finansial masyarakat siap untuk membeli handphone dan membeli kuota jaringan internet secara mandiri, serta masyarakat mampu membayar uang printnan surat yang telah terdownload melalui SIKECE. Bagi masyarakat dengan penghasilan menengah keatas tidak merasakan keberatan dalam sumber daya finansial untuk menggunakan SIKECE. Namun sebaliknya beberapa masyarakat tidak siap secara finansial untuk ketersediaan infrastruktur yang

mendukung penggunaan SIKECE. Sedangkan finansial Kantor Lurah Kerinci Timur yang mendukung pelaksanaan SIKECE saat ini sudah siap berasal dari APBD pelalawan yang diletakkan Di Kantor Camat Pangkalan Kerinci dan dialokasikan kepada Kantor Lurah Kerinci Timur dalam bentuk belanja rutin fasilitas pendukung seperti komputer dan printer, serta berasal dari Corporate Social Responsibility (CSR) PT RAPP. Website SIKECE memiliki tampilan desain yang sudah bagus dan memiliki 17 jenis pelayanan yang bisa dipilih oleh masyarakat sesuai kebutuhan. Untuk keamanan data masyarakat sejauh ini belum ada laporan khusus mengenai pencurian data. Namun Kantor Lurah harus mengelola server sendiri untuk memastikan keamanan data masyarakat kedepannya, permohonan pengelolaan server ini sudah dilakukan kepada (DISKOMINFO) namun belum adanya respon hingga saat ini. Saat ini sebagian masyarakat memiliki kompetensi dan keahlian yang siap menggunakan SIKECE. Namun sebagian masyarakat yang kurang siap memanfaatkan teknologi terutama yang berusia diatas 40 tahun belum memiliki kesiapan menggunakan SIKECE.

3. Indikator *Value* (manfaat/nilai) berada dalam kategori kurang siap Website SIKECE telah memberikan nilai tambah yang signifikan bagi masyarakat dengan menyediakan layanan yang efisien dan efektif. Masyarakat dapat mengurus berbagai keperluan terutama surat menyurat yang disediakan dalam 17 pelayanan dalam website SIKECE, sementara itu Kantor Lurah dapat meningkatkan efisiensi pelayanan dan mencapai tujuan. Namun masih terdapat permasalahan yaitu pegawai Lurah Kerinci Timur kurang siap memanfaatkan SIKECE sebagai pemberian pelayanan utama yang dipilih masyarakat. Sehingga masyarakat masih melakukan pelayanan secara manual yang membuat kantor lurah kurang maksimal menerima manfaat dari kehadiran SIKECE. Dan untuk masyarakat yang tidak siap menggunakan SIKECE karena faktor ketidak tahuan akan adanya SIKECE dan karena kurangnya pemahaman terhadap teknologi tidak merasakan manfaat dari SIKECE tersebut.

## Daftar Pustaka

### Buku dan Jurnal:

- Administrasi Publik FISIP UIN SGD Bandung.2022.*Ayat-Ayat Administrasi Publik dalam Al-Qur'an*. Bandung
- Creswell,W John.2009.*Research Design Qualitative Quantitative and mixed methods approaches*.India:Sage publications.
- Fadhillah, E., Nugroho, K. S., & Fuad, A. (2011). *Kesiapan Penerapan E-Government di Pemerintahan Daerah Kabupaten Tangerang* (Doctoral dissertation, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa).
- Handayani, S. A. (2022). *Implementasi E-Government Melalui Aplikasi SIPADUKO di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi pada Era New Normal* (Doctoral dissertation, Ilmu Pemerintahan).
- Husaini,Usman.Purnomo,SetiadyAkbar.(2017).*Metodelogi Penelitian Sosia*.Bumi Aksara. Jakarta.
- Indrajit, Richardus Eko. 2003. *Electronic Government: Konsep Pelayanan Public Berbasis internet dan Teknologi Informasi*. Yogyakarta: Penerbit Andi Offset

- Indrajit, Richardus Eko. 2016. *Konsep dan Strategi Electronic Government*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta
- Kausar, S., Said, M. M. U., & Sekarsari, R. W. (2022). *E-readiness dalam penerapan online single submission (oss) di kota Malang (Studi Kasus Pada Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DISNAKER PMPTSP) Kota Malang)*. *Respon Publik*, 16(8), 26-34.
- Kurniawan, R., Fuad, A., & Handayani, R. (2015). *Analisis Kesiapan Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Serang Dalam Penyelenggaraan Elektronik Kartu Tanda Penduduk (E-KTP)* (Doctoral Dissertation, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa).
- Kurniawati, K. (2020). *Analisis Pelaksanaan E-government Dalam Peningkatan Pelayanan Publik Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau).
- Lestari, D., Winarno, W. W., & Kurniawan, M. P. (2021). Model E-Readiness Untuk Pengukuran Kesiapan Pengelolaan Aduan E-Lapor DIY. *Creative Information Technology Journal*, 7(2), 86-94.
- Maksudi, Beddy Iriawan. (2018). *Dasar-Dasar Administrasi Negara*. Rajawali Pers. Depok.
- Muqhita, D., & Handayaningsih, S. (2013). *E-Readiness Pembuatan Model Sistem M-Government (Studi Kasus Pemerintah Kota Yogyakarta)* (Doctoral dissertation, Universitas Ahmad Dahlan).
- Nanan, Martono. (2010). *Statistik Sosial*. Gava Media. Yogyakarta.
- Nugroho, R. A. (2020). Kajian analisis model e-readiness dalam rangka implementasi e-government. *Masyarakat Telematika Dan Informasi: Jurnal Penelitian Teknologi Informasi Dan Komunikasi*, 11(1), 65.
- Nugroho, R. A. (2020). Kajian analisis model e-readiness dalam rangka implementasi e-government. *Masyarakat Telematika Dan Informasi: Jurnal Penelitian Teknologi Informasi Dan Komunikasi*, 11(1), 65.
- Nurman, Sukri, Al, Suryani, Lilis. (2023). *Teori Administrasi: Administrasi Executive*. CV Budi Utama. Yogyakarta.
- Handrian, E., & Andry, H. (2020). Sustainable Development Goals: Tinjauan Percepatan Pencapaian di Provinsi Riau. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(1), 77-87.
- Handrian, E., Muslikhah, U., & Rosmita, R. (2024). Diffusion of Application Policy Innovation Pekan Kita (PEKA) in Pekanbaru City. *Jurnal Administrasi Publik*, 15(1).
- Handrian, E., & Andry, H. (2020). Sustainable Development Goals: Tinjauan Percepatan Pencapaian di Provinsi Riau. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(1), 77-87.
- Handrian, E., Muslikhah, U., & Rosmita, R. (2024). Diffusion of Application Policy Innovation Pekan Kita (PEKA) in Pekanbaru City. *Jurnal Administrasi Publik*, 15(1).

- Andry, H., & Handrian, E. (2017, November). E-Implementation of E-Government In Regional Financial Management (Study at the Regional Finance and Asset Management Board of Riau Province). In *International Conference on Democracy, Accountability and Governance (ICODAG 2017)* (pp. 152-155). Atlantis Press.
- Handrian, E., Rosmita, R., & Suriani, L. (2023). Inclusive Development for Marginal Group Street Trader in Tembilahan Indragiri Hilir District. *Jurnal Administrasi Publik*, 14(1).
- Handrian, E. (2019). Pengaruh Reformasi Birokrasi Terhadap Kualitas Pelayanan Pembuatan Surat Izin Mengemudi Golongan C (Sim C) Pada Sat Lintas Polresta Pekanbaru. *Publika: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(1), 137-155.
- Handrian, E., & Andry, H. (2020). Penguatan Pemerintahan Daerah Dalam Pengelolaan Kawasan Perbatasan Di Kabupaten Kepulauan Meranti. *Jurnal Kemunting*, 1(2), 183-203.
- Handrian, E., & Hawa, S. (2022). Implementasi program pengembangan perikanan tangkap pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru. *JIAP (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)*, 10(1), 49-58.
- Handrian, E. (2024). E-govqual Aplikasi PEKA (Pekan Kita) Pada Dinas Komunikasi Informatika Statistik Dan Persandian Kota Pekanbaru. *Journal of Public Administration Review*, 1(1), 74-89.
- Handrian, E. (2024). Evaluasi Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian Dan Pengembangan Provinsi Riau (Studi Tujuan Pertama: Kemiskinan) Di Kota Pekanbaru. *Journal of Public Administration Review*, 1(1), 708-729.
- Handrian, E., & Putriani, S. (2021). Reformasi Administrasi Pelayanan Publik di Kantor Camat Minas Kabupaten Siak Provinsi Riau. *JIAP (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)*, 9(2), 143-154.
- Handrian, E., Rosmita, R., & Khan, M. C. (2021). Model Inkremental: Evaluasi Program Peningkatan Kesempatan Kerja di Provinsi Riau. *JIAP (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)*, 9(1), 1-12.
- Nurman, Yusriadi, Y., & Hamim, S. (2022). Development of pluralism education in Indonesia. *Journal of Ethnic and Cultural Studies*, 9(3), 106-120.
- Nasri, H., Nurman, N., Azwirman, A., Zainal, Z., & Riauan, I. (2022). Implementation of collaboration planning and budget performance information for special allocation fund in budget planning in the regional development planning agency of Rokan Hilir regency. *International Journal of Health Sciences (IJHS) Ecuador*, 6(S4), 639-651.
- Nurman, N., Zainal, Z., & Rajasa, Y. (2021). Good Governance in Structure Belantik Raya People's Market in Siak District. *Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government, Social and Politics*, 7(2), 1-11.
- Nurman, M. P. (2015). Strategi Pembangunan Daerah.
- Rusli, R., & Nurman, N. (2016). Implementasi Fungsi Koordinasi Camat Dalam Pembuatan
- Yuriska Addriani dan Eko Handrian

- Kartu Keluarga Dan Kartu Tanda Penduduk Di Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai. *Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government, Social and Politics*, 2(1), 27-39.
- Parjiyana, P. (2015). Implementasi Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 128 Tahun 2004 Tentang Kebijakan Dasar Pusat Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government, Social and Politics*, 1(2), 41-54.
- Fista, L., & Parjiyana, P. (2024). Pelaksanaan Fungsi Kepala Desa Dalam Pembinaan Kemasyarakatan Di Desa Kuantan Babu Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu. *Journal of Public Administration Review*, 1(1), 26-36.
- Parjiyana, P., Nazir, Y., Wedayanti, M. D., & Mardianto, M. (2019). Peranan Kepala Dusun Dalam Membantu Tugas Kepala Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(2), 198-205.
- Afhissa, C., & Parjiyana, P. (2017). Analisis Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Pimpinan di Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BDLHK) Pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(2), 207-223.
- Marcella, A., & Parjiyana, P. (2018). ANALISIS PELAYANAN UMUM DI PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) TIRTA INDRA KABUPATEN INDRAGIRI HULU. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 4(1), 17-35.
- Suriani, L., Nisa, K., & Affandi, L. H. (2023). Pelaksanaan Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila Tema Gaya Hidup Berkelanjutan di Sekolah Dasar. *Jurnal Educatio FKIP UNMA*, 9(3), 1458-1463.
- Suriani, L., & Lumintang, G. (2018). Pengaruh Kompensasi, Disiplin Kerja Dan Etika Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Di Pt. Transindo Jaya Bahari Maumbi Manado. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 6(4).
- Suriani, L., & Sidabutar, O. J. (2019). Kualitas Pelayanan Dan Peraturan Tata Tertib Perpustakaan Terhadap Kepuasan Pemustaka Di Perpustakaan Soeman Hs. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(2), 190-197.
- Handrian, E., Rosmita, R., & Suriani, L. (2023). Inclusive Development for Marginal Group Street Trader in Tembilahan Indragiri Hilir District. *Jurnal Administrasi Publik*, 14(1).
- Syafitri, I., & Suriani, L. (2019). Peran Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Sejati Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(1), 44-54.
- Hamim, S., Vianda, L., & Pitaloka, S. (2020). Penerapan Prinsip Prinsip Pelayanan Publik Di Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Dan Catatan Sipil Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(1), 1-10.
- Adnan, I. M., & Hamim, S. (2013). Administrasi, Organisasi Dan Manajemen Suatu Ilmu, Teori, Konsep Dan Aplikasi.

- Hamim, S. (2005). Sistem Perencanaan Strategis Dalam Pembangunan.
- Adnan, I. M., & Hamim, S. (2013). Administrasi, Organisasi Dan Manajemen Suatu Ilmu, Teori, Konsep Dan Aplikasi.
- Adnan, I. M., & Hamim, S. (2014). Filsafat Ilmu, Ilmu Pengetahuan dan Penelitian.
- Andry, H., & Yussa, A. T. (2015). Perilaku dan Etika Administrasi Publik. *Pekanbaru: Marpoyan Tujuh Publishing*.
- Handrian, E., & Andry, H. (2020). Sustainable Development Goals: Tinjauan Percepatan Pencapaian di Provinsi Riau. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(1), 77-87.
- Andry, H. (2017). Pelayanan Publik Pengurusan Izin Mendirikan Bangunan Di Kecamatan Mandau Oleh Dinas Tata Kota, Tata Ruang Dan Pemukiman Kabupaten Bengkalis. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(1), 66-79.
- Andry, H., & Zulkifli, Z. (2023). Evaluasi pengelolaan parkir oleh dinas perhubungan kota pekanbaru. *Eqien-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 12(02), 194-205.
- Andry, H., Herman, H., & Rahmah, J. (2023). PELAKSANAAN KOORDINASI DINAS KESEHATAN KOTA PEKANBARU DAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA PEKANBARU DALAM PENGHAPUSAN ASET KENDARAAN DINAS OPERASIONAL KHUSUS (AMBULANCE). *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP)*, 12(1), 18-28.
- Abdullah, S., Hamim, S., & Ermayuna, S. (2021). Strategi Pembangunan Pertanian Tanaman Pangan Di Lahan Gambut Desa Pulau Palas Kabupaten Indragiri Hilir. *Pascasarjana Ilmu Administrasi Universitas Islam Riau*, 1-83.
- Anggara, B., & Abdullah, S. (2017). Pelaksanaan Pengawasan Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Pekanbaru Dalam Pendistribusian Gas Lpg 3 Kg Di Kota Pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(2), 248-261.
- Ariswanto, N. S., & Abdullah, S. (2016). Analisis Pelaksanaan Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Di Desa Berumbung Baru Kecamatan Dayun Kabupaten Siak. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 2(2), 197-215.
- Herman, H., Kartius, K., Abdullah, S., & Hasibuan, C. R. (2024). Collaborative Governance In Overcoming Unemployment in Bengkalis Regency, Riau Province. *PERSPEKTIF*, 13(1), 164-173.
- Abdullah, S., & Safri, I. (2023). Pemberdayaan Masyarakat Dalam Mengelola Potensi Masyarakat Desa Kampung Panjang Kabupaten Kampar. *Masyarakat Berdaya dan Inovasi*, 4(2), 242-248.
- Nurmasari, N., & Al Hafis, R. I. (2019). Desentralisasi Asimetris: Kemiskinan ditengah kelimpahan otonomi khusus papua. *JPAP: Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 5(2), 1180-1192.
- Nurmasari, N., Komalasari, E., Mulianto, B., Nurman, N., & Amrillah, M. F. (2024). PELATIHAN INOVASI BANK SAMPAH PLASTIK UNTUK PENINGKATAN PENDAPATAN EKONOMI MASYARAKAT DI BANK SAMPAH PUAN SARI

MANDIRI. *Jurnal ADAM: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(1), 35-40.

- Kurniawan, R., & Nurmasari, N. (2017). Analisis Kinerja Pegawai Pada Bidang Pelayanan Dan Informasi Di Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Siak. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(1), 122-134.
- Afringgo, R., Nurmasari, N., & Zubaidah, E. (2021). Efektifitas E-Warong sebagai Sarana Pengintegrasian Tujuan Program Keluarga Harapan pada Kelompok Target KUBE Berkah Harapan di Kota Pekanbaru. *Jurnal Ranah Publik Indonesia Kontemporer (Rapik)*, 1(1), 22-29.
- Nurmasari, N., & Wedayanti, M. D. (2018, August). HUMAN RESOURCE MANAGEMENT CIVIL SERVANT EMPLOYEES IN THE FRAMEWORK OF REFORM BUREAUATION IN RIAU PROVINCE. In *ICSScE 2018*.
- Herman, H., Suriani, L., & Farisha, N. (2021). Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Sampah Pada Pasar Milik Pemerintah Kota Pekanbaru. *Publikauma: Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area*, 9(2), 81-90.
- Herman, H. (2019). Pelaksanaan Corporate Social Responsibility Oleh Stakeholders Primer Dan Skunder Di Riau. *Jurnal Ilmiah Manajemen Publik Dan Kebijakan Sosial*, 2(2).
- Herman, H., & Novarizal, R. (2017). Faktor-faktor ideal perusahaan dalam pelaksanaan CSR (Corporate Social Responsibility). *Sisi Lain Realita*, 2(2), 39-53.
- Nengsih, I. A., & Herman, H. (2019). Strategi Pelayanan Izin Praktek Dokter Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Pekanbaru. *Asketik*, 3 (2), 163–175.
- Novarizal, R., & Herman, H. (2019). Pengamanan Lembaga Pemasarakatan Terhadap Kemungkinan Terjadinya Pelarian (Studi Kasus Lapas Kelas II A Pekanbaru): Universitas Islam Riau. *Sisi Lain Realita*, 4(1), 90-102.
- Suri, D. M. (2017). Analisis faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan penertiban dan pembinaan gelandangan dan pengemis di kota pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(1), 89-101.
- Suri, D. M., & Nurmandi, A. (2021, July). Deep learning methods as a detection tools for forest fire decision making process fire prevention in Indonesia. In *International Conference on Human-Computer Interaction* (pp. 177-182). Cham: Springer International Publishing.
- Suri, D. M., Nurmandi, A., Qodir, Z., & Al Fadhat, F. (2021). Narrative Policy Framework: The Role Of Media Narrative Towards Forest And Land Fire Policy In Indonesia. *Universitas Muhammadiyah Yogyakarta*.
- Hildawati, H., & Suri, D. M. (2020). Potensi UEK-SP Kelurahan Rimba Sekampung Untuk Transformasi Menjadi Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Di Kota Dumai. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(1), 24-42.
- Yogia, M. A., & Suri, D. M. (2020). Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Usaha Ekonomi Kelurahan. *Sosio Konsepsia*, 9(03), 247-256.
- Al Hafis, R. I., & Yogia, M. A. (2017). Abuse of power: Tinjauan terhadap penyalahgunaan

kekuasaan oleh pejabat publik di Indonesia. *Publika: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(1), 80-88.

- Hafis, A., Imam, R., Hakim, A., & Haryono, B. S. (2014). Aktor Pelaksana Pengelolaan Transportasi Publik Perkotaan (Studi Kasus Bus Trans Metro Di Kota Pekanbaru). *Jurnal Wacana*, 16(4), 171-178.
- Al Hafis, R. I. (2018). Pembangunan Daerah Perbatasan Yang Terabaikan: Kajian Perbatasan Kecamatan Rupert Utara Kabupaten Bengkalis–Selat Malaka. *Gema Publica*, 3(2), 111-119.
- Al Hafis, R. I., Warsono, H., Larasati, E., & Purnaweni, H. (2021). The paradox of collaborative governance in leprosy rehabilitation in Central Java. *Management and Entrepreneurship: Trends of Development*, 3(17), 55-67.
- Al Hafis, R. I., Wardana, D., Setiawati, S., & Putra, A. I. (2024). Proses Collaborative Governance untuk Mengurangi Dampak Abrasi. *Kaganga: Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora*, 7(1), 521-529.
- Lubis, E. F., & Zubaidah, E. (2020). Efektivitas Program Keluarga Harapan Dalam Penanggulangan Kemiskinan. *Societas: Jurnal Ilmu Administrasi dan Sosial*, 9(2), 88-99.
- Zubaidah, E., & Lubis, E. F. (2021). Inovasi Layanan Aplikasi e-Samsat Dalam Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Di Provinsi Riau. *Jurnal Niara*, 14(2), 120-125.
- Zubaidah, E. (2018). Analisis Manajemen Perkantoran Dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai PT. Pegadaian Persero Kantor Wilayah II Pekanbaru. In *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Administrasi Perkantoran*.
- Zubaidah, E., Nurmandi, A., Pribadi, U., Hidayati, M., & Lubis, E. F. (2022, March). The Factors Influencing the Community to Use E-Service in Pekanbaru City, Indonesia. In *International Conference on Public Organization (ICONPO 2021)* (pp. 310-318). Atlantis Press.
- Zubaidah, E. (2016). MANAJEMEN PANTI ASUHAN DALAM PERSPEKTIF HENRI FAYOL:(STUDY KASUS PANTI ASUHAN USMAN BIN AFFAN). *VALUTA*, 2(1), 130-139.
- Zubaidah, E., Monalisa, M., Rusadi, S., & Handoko, T. (2024). E-Readiness Analysis to Accelerate Transformation Towards E-Government in Regional Government in Indonesia. *Jurnal Bina Praja*, 16(1), 37-53.
- Wedayanti, M. D., Nurmandi, A., Jubba, H., & Pulungan, B. I. (2022). Political Interaction Strategy Corporate Social Responsibility of PT Riau Andalan Pulp and Paper in Riau Province, Indonesia. *International Journal of Sustainable Development & Planning*, 17(8).
- Wedayanti, M. D., & Susanti, H. (2019). Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat (CBT) Menggunakan Kontribusi Corporate Social Responsibility (CSR) di Pekanbaru Provinsi Riau. *WEDANA: Jurnal Kajian Pemerintahan, Politik dan Birokrasi*, 5(2), 32-37.

- Wedayanti, M. D., Nurmandi, A., Jubba, H., & Juliana, S. (2021, January). Implementation of Corporate Social Responsibility in PT. Riau Andalan Pulp and Paper in Pelalawan District, Riau Province. In *INCEESS 2020: Proceedings of the 1st International Conference on Economics Engineering and Social Science, InCEESS 2020, 17-18 July, Bekasi, Indonesia* (p. 71). European Alliance for Innovation.
- Wedayanti, M. D., & Zulkifli, Z. (2015). Pelaksanaan Pengawasan Barang dan Jasa Beredar Oleh Seksi Perlindungan Konsumen Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 1(1), 52-72.
- Parjiyana, P., Nazir, Y., Wedayanti, M. D., & Mardianto, M. (2019). Peranan Kepala Dusun Dalam Membantu Tugas Kepala Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(2), 198-205.
- Lubis, E. F., & Zubaidah, E. (2020). Efektivitas Program Keluarga Harapan Dalam Penanggulangan Kemiskinan. *Societas: Jurnal Ilmu Administrasi dan Sosial*, 9(2), 88-99.
- Lubis, E. F., & Zubaidah, E. (2019). Efektivitas Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB-RW) Dalam Mewujudkan Prinsip Tridaya Di Kota Pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(2), 156-163.
- Lubis, E. F. (2015). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (Pnpm Mpd)(Studi Kasus: Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan Di Nagari Tanjung Betung Kabupaten Pasaman). *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 1(2), 304-317.
- Lubis, E. F., & Indira, T. T. (2023). PENGARUH STORE ATMOSPHERE TERHADAP KEPUASAN KONSUMEN PADA AYAM PENYET CINDELARAS BAGAN BATU KABUPATEN ROKAN HILIR. *PubBis: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi Publik dan Administrasi Bisnis*, 7(1), 1-9.
- Lubis, E. E. F. (2024). PELATIHAN PEMBUATAN SABUN CUCI PIRING UNTUK MENINGKATKAN TAMBAHAN PENDAPATAN PADA IBU-IBU KELOMPOK MELATI PUTIH DALAM PROGRAM KELUARGA HARAPAN DI KECAMATAN SUKAJADI KOTA PEKANBARU. *Multidisciplinary Indonesian Center Journal (MICJO)*, 1(1), 120-126.
- Herman, H., Kartius, K., Abdullah, S., & Hasibuan, C. R. (2024). Collaborative Governance In Overcoming Unemployment in Bengkalis Regency, Riau Province. *PERSPEKTIF*, 13(1), 164-173.
- Handrian, E., Rosmita, R., Suriani, L., & Kartius, K. (2022). Reformasi Badan Usaha Milik Desa Kesumbo Sejahtera di Desa Kesumbo Ampai Kabupaten Bengkalis. *Jurnal Mandala Pengabdian Masyarakat*, 3(2), 231-237.
- Kurniawan, A. (2020). Pengaruh Kepemimpinan Diri Sendiri Terhadap Sikap Wirausaha Pada Usaha Makanan Tradisional Di Desa Palung Raya Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(2), 179-191.

- Kurniawan, A., Rezki, D., & Riau, U. I. (2023). Collaborative Governance Dalam Menangulangi Banjir di Kota Sungai Penuh Collaborative Governance in Overcoming Floods in the City of Sungai Penuh. *Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 9(1), 1-18.
- TARMIZI, A., KURNIAWAN, A., ADERISKA, M., & AFRIZAL, T. (2022). Analysis of Quality Electronic Identity Card Service in Sub-District West Meral of Karimun District, Riau Islands (Integrated Sub-District Administration Service Model "Paten"). *International Journal of Society, Development and Environment in the Developing World*, 6, 62-72.
- Tarmizi, A., & Kurniawan, A. (2017). Model Administrasi Pribumi Masyarakat Adat Melayu Petalangan di Desa Sialang Godang Kabupaten Pelalawan Riau. In *Seminar Nasional "Mitigasi dan Strategi Adaptasi Dampak Perubahan Iklim di Indonesia"* (pp. 165-177).
- Yusa, A. T., Andry, H., & Kurniawan, A. (2016). Restorasi Paradigma KUD:" Pendekatan Teori Organisasi Dalam Merebut Peluang MEA".
- Yunisman, Y., Salioso, H., Febrianto, S., Prayuda, R., & Mardatillah, A. (2022). Analysis of quality of animal health services by veterinary medical and veterinary paramedic services in food security and agricultural agency of Rokan Hilir Regency. *International Journal of Health Sciences*, 14(3), 1030-1046.
- Larasati, D., Indrastuti, S., Salioso, H., Yussa, H. A., & Suri, D. M. (2022). Analysis of the effect of job satisfaction and job motivation on the performance of cleaning officers at the environmental service agency Rokan Hilir district Indonesia. *International Journal of Health Sciences*, 6(4), 573-588.
- Salioso, H. (2016). ASN, OTDA, Politik Pilkada Serentak dan Korupsi di Indonesia. *SISI LAIN REALITA*, 1(1), 01-07.
- Adha, M. L., & Salioso, H. (2024). KINERJA ORGANISASI DI KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN BASARNAS KELAS A PEKANBARU. *JURNAL KEMUNTING*, 5(1), 1-16.
- Askarial, A., Rinaldi, K., & Salioso, H. (2016). Kota Dumai Dalam Pidato Seorang Walikota.
- Putri, M. R. R., Sukarno, D., & Halim, H. A. (2022). E-readiness dinas penataan ruang kota bandung dalam penyelenggaraan pelayanan keterangan rencana kota (KRK) online e-readiness bandung city spatial planning agency in organizing online krk service.
- Tangkilisan (2003). Implementasi Kebijakan Publik. Yogyakarta: Lukman Offset YPAPI.
- Terry, G. R. (2014). *Prinsip-Prinsip Manajemen*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Tresiana, Novita., Duadji, Noverman. *Pengantar Ilmu Administrasi Publik*. CV Anugrah utama raharja. Bandar lampung
- Windy, Wulandari Trisetia. e-Readiness Penerapan Sistem Online Single Submission dalam Pelayanan Perizinan Berusaha di Kabupaten Pinrang= e-Readiness Application of Online Single Submission System in Business Licensing Services in Pinrang Regency. Diss. Universitas Hasanuddin, 2022

**Dokumentasi :**

Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan strategi Nasional Pengembangan E-Government.

Keputusan Camat Pangkalan Kerinci Nomor KPTS.100/L-PKT/2023.Oktober 2023 Tentang tim pelaksana dan pengelolaan inovasi Sistem Kerja Cepat (SIKECE) kelurahan kerinci timur kecamatan pangkalan kerinci kabupaten pelalawan.

Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Inovasi Daerah pada Pasal 1 yang menjelaskan, bahwa Inisiatif Inovasi Daerah berasal dari Perangkat Daerah

Undang-Undang Pemerintahan Daerah tahun 2014 tentang pemerintah daerah.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 195 Tentang Pemerintahan Daerah